

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Analisis Masalah

Sejarah keuangan di Indonesia sudah diketahui sejak masa lampau. Pengelolaan keuangan digunakan untuk memastikan terlaksananya pembangunan dalam pemerintahan. Administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara dapat menghasilkan pembangunan ekonomi yang berjalan dengan lancar. Manajemen keuangan negara di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 pasal 1 tentang keuangan negara mengatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut<sup>1</sup>.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan,

---

<sup>1</sup> UU RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.," 2003.

yang ditetapkan dalam APBN dan APBD<sup>2</sup>. Berdasarkan pengertian tentang perbendaharaan negara, diketahui ruang lingkup perbendaharaan negara meliputi pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi milik negara/daerah, penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, penyelesaian kerugian negara/daerah, pengelolaan badan layanan umum, perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan APBN/APBD<sup>3</sup>. Undang-undang di atas merupakan pedoman serta landasan agar keuangan negara Indonesia dapat dikelola dengan tertib, ekonomis, efisien, transparan serta tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan terhadap prinsip yang berlaku<sup>4</sup>. Untuk menghindari adanya penyimpangan keuangan negara maka

---

<sup>2</sup> UU RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara," 2004.

<sup>3</sup> Bagus Kusumanegara, "Lingkup Dan Asas Umum Perbendaharaan Negara," 2015, <https://baguskusumanegara.wordpress.com/2015/10/25/ruang-lingkup-perbendaharaan-negara/>.

<sup>4</sup> Novia Tri Kurniasari, Anna Fariyanti, and Nirwan Ristiyanto. 2019. "Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process," (*Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*). No. 2.

diperlukannya pengelolaan keuangan negara dengan baik agar tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, bendahara merupakan pejabat fungsional yang independen tentunya memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup besar. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 pasal 1 tentang perbendaharaan negara, bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah<sup>5</sup>.

Perkembangan ilmu teknologi informasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Sistem dalam jaringan online banyak digunakan dalam berbagai macam kebutuhan di dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya dalam bidang pemerintahan yaitu *e-government*. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* pemerintah melakukan proses perubahan menuju *e-government*<sup>6</sup>. Berdasarkan jurnal "*E-Government in China*" menunjukkan bahwa penggunaan *e-government* di negara tersebut

---

<sup>5</sup> UU RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara."

<sup>6</sup> Claudia Putri, Laura. 2020. "PROSEDUR PENCAIRAN DANA MENGGUNAKAN APLIKASI SAS 2020 PADA SATKER BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V". Skripsi: Universitas Andalas

digunakan untuk pengelolaan perekonomian nasional. Selain itu, adanya *e-government* diakui dapat mengurangi biaya transaksi dan juga mempermudah layanan kepada masyarakat<sup>7</sup>. Kemajuan teknologi yang semakin pesat mendorong pemerintah untuk terus memanfaatkan teknologi serta pengembangan teknologi agar mampu bertahan dan bersaing. Perkembangan teknologi tentunya menyebabkan suatu pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah dan juga mendapatkan hasil yang baik. Sejalan dengan perkembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, pimpinan Direktorat Jendral Perbendaharaan bertujuan menciptakan pelayanan yang dapat memberikan layanan yang akurat, cepat, efektif, dan efisien serta transparan.

Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap perusahaan atau perkantoran adalah pengelolaan keuangan. Segala proses pengelolaan keuangan pada umumnya tertuang dalam dokumentasi tertulis. Termasuk dalam laporan keuangan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak baik internal maupun eksternal yang diantaranya tidak memiliki wewenang untuk memperoleh informasi tersebut<sup>8</sup>. Banyaknya dokumen, surat-surat, nota atau memo keuangan

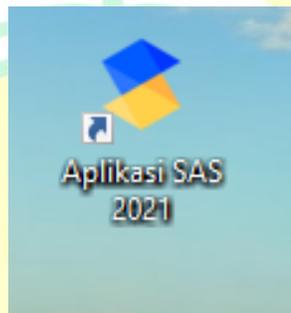
---

<sup>7</sup> IAN Holliday and RAY Yep, "E-GOVERNMENT IN CHINA" 249 (2005): 239–49. Hlm. 249.

<sup>8</sup> Tuti Sriwedari, "Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Mediasi* 4, no. 1 (2012): 78–88.

yang dapat merumitkan segala prosesnya, tentunya menyebabkan alur proses yang panjang sehingga waktu proses semakin lama pula, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor diterapkannya sistem online dalam pengelolaan keuangan.

Pada era teknologi saat ini, banyak lembaga-lembaga terutama lembaga pemerintah yang menggunakan teknologi untuk mengelola berbagai hal, salah satu contohnya yaitu penggunaan sistem aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan kantor. Salah satu lembaga pemerintah yang menggunakan sistem aplikasi adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM RI pada bagian Satker Deputy III BPOM yaitu menggunakan Sistem Aplikasi Satker (SAS), aplikasi SAS merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan pada tingkatan Satker yang diluncurkan pada tahun 2015.



Gambar 1. 1 Aplikasi SAS 2021

Sistem Aplikasi Satker (SAS) adalah aplikasi berbasis desktop yang digunakan untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga beberapa fungsi terpadu lainnya dalam pelaksanaan APBN seperti membuat Data Kontrak, Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara bagi Satker. Aplikasi SAS ini sangat penting karena menjadi dasar menerbitkan surat perintah pencairan dana dimana setelah itu dana APBN yang masuk dalam DIPA satker tersebut dicairkan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Pengusaha Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk memproses pencairan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan<sup>9</sup>. Dana yang dicairkan merupakan dana yang dipergunakan untuk uang persediaan membayar kegiatan operasional kantor sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh pengembang kepada salah satu karyawan Satker Deputi III BPOM RI dengan jabatan aplikator SPM bahwa karyawan pernah mengikuti sosialisasi mengenai SAS pada tahun 2019 namun masih sering terjadi

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Keuangan. 2010. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Tagihan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja".

kesalahan dalam mengoperasikan aplikasi SAS ini. Kesalahan pengoperasian ini mengakibatkan perbaikan SPM yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana APBN yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor, seperti dana untuk perjalanan dinas dan honorarium menjadi terlambat pencairannya, selain itu biaya operasional sehari-hari seperti biaya alat tulis kantor, biaya persiapan dan konsumsi untuk rapat serta biaya-biaya lainnya yang digunakan untuk operasional kantor menjadi terhambat pencairannya. Keadaan di atas mendukung bahwa aplikasi SAS ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh karyawan pada Satker Deputi III BPOM RI sebab tidak adanya bahan ajar atau media yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan aplikasi SAS. Selama ini aplikasi SAS belum memiliki panduan dalam pengoperasiannya, serta banyak karyawan yang tidak mengingat dan juga kurang memahami saat mengoperasikan aplikasi SAS ini sehingga sering terjadi kesalahan saat mengoperasikan.

Terdapat faktor lain yaitu mayoritas karyawan satker deputi III BPOM RI sudah memasuki usia relatif tua, dimana kurang menguasai teknologi dan tidak mudah mengingat dengan baik maka dari itu diperlukannya suatu media berbentuk cetak yang dapat dipelajari berulang-ulang, dan menyajikan serta menjelaskan informasi penggunaan aplikasi SAS dengan detail dan rinci. Selain itu, buku

panduan dipilih karena bentuknya lebih praktis dan dapat digunakan tanpa bantuan media alat lain. Berdasarkan karakteristik sasaran dengan perbedaan latar belakang pendidikan serta usia yang mayoritas sudah memasuki usia relative tua maka media paling umum yang dapat digunakan adalah media berupa buku panduan karena bersifat *repeatable* dan dapat membuat pembaca menganalisis isi materi dengan lebih mudah dipahami. Oleh sebab itu pengembang bermaksud untuk menghasilkan sebuah buku panduan untuk memfasilitasi karyawan Satker Deputi III BPOM RI dalam menggunakan aplikasi SAS dengan baik dan efektif.

Kesalahan dalam menggunakan aplikasi SAS akan terjadi bila dalam proses pengerjaannya tidak difasilitasi oleh pedoman atau panduan yang bersifat rinci atau detail. Memfasilitasi belajar karyawan artinya memberikan sarana yang dapat membantu karyawan dalam proses pembelajaran.

Memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja merupakan peran Teknologi Pendidikan, sesuai definisi Teknologi Pendidikan menurut AECT Tahun 2004. *"Educational technology is the study and ethical practice of facilitating Learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and*

*resources*<sup>10</sup>. Definisi tersebut memiliki makna bahwa teknologi pendidikan merupakan studi dan juga praktik etis yang memiliki peran dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai.

Pada penelitian ini pengembang mengembangkan buku panduan untuk memfasilitasi pemanfaatan sistem aplikasi SAS dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada Satker Deputy III BPOM RI. Maka dari itu, sebagai seorang teknolog pendidikan sekiranya dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan buku panduan penggunaan Sistem Aplikasi Satker (SAS) untuk memfasilitasi belajar karyawan petugas Satker Deputy III BPOM RI terutama Aplikator SAS (aplikator SPM dan PPSPM) ketika melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, pengembang tertarik meneliti lebih jauh dalam proses pengelolaan keuangan dengan judul **“PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN SISTEM APLIKASI SATKER**

---

<sup>10</sup> Dewi Salma Prawiradilaga, *Wawasan Teknologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 31.

**(SAS) UNTUK PEMBUATAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)  
PADA SATKER DEPUTI III BPOM RI”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan analisis masalah di atas, penulis telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah tersedia panduan dalam penggunaan Sistem Aplikasi Satker (SAS) untuk pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)?
2. Apakah akibat yang terjadi jika karyawan pada Satker Deputy III BPOM RI belum memahami atau melakukan kesalahan dalam proses mengoperasikan aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS)?
3. Media seperti apakah yang tepat dalam memfasilitasi penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Satker untuk pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)?
4. Bagaimana mengembangkan buku panduan dalam penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) untuk pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)?

### C. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

#### 1. Jenis Masalah

Penelitian ini membatasi masalah pada poin keempat di uraian identifikasi masalah yaitu: “Bagaimana mengembangkan buku panduan dalam penggunaan Sistem Aplikasi Satker (SAS) untuk pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)?”.

#### 2. Jenis Media

Media yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah buku panduan penggunaan Sistem Aplikasi Satker (SAS) dalam pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM). Materi yang akan disajikan dalam buku panduan ini adalah Konsep Sistem Aplikasi Satker (SAS), Persiapan Penggunaan SAS, Tahapan Pembuatan SPM.

#### 3. Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah karyawan Satker Deputi III BPOM RI terlebih khusus aplikator SAS (aplikator SPM dan PPSPM)

#### 4. Tempat

Tempat yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah Badan POM RI yang terletak di Jl. Percetakan Negara No.23 Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10560.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan buku panduan penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) dalam pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia di Satker Deputi III BPOM RI terutama Aplikator SAS (Aplikator SPM dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) khususnya dalam mengoperasikan aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi Mahasiswa Teknologi Pendidikan

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau sebuah referensi bagi pengembang lain yang memiliki kesinambungan yang serupa dengan penelitian ini, seperti

contoh pengembangan buku panduan sebuah aplikasi atau lainnya, dikemudian hari agar dapat melaksanakan penelitian dengan lebih mendalam dan lebih baik.

b. Bagi Pengembang

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana dalam meningkatkan wawasan serta pengetahuan dalam menerapkan pengetahuan materi semasa perkuliahan kedalam bentuk praktik nyata dengan baik dan benar.
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengembang

Pengembang mampu menghasilkan buku panduan penggunaan Sistem Aplikasi Satker untuk pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sesuai dengan materi dan kebutuhan.

b. Bagi karyawan Satker Deputy III BPOM RI

1. Hasil produk ini berupa buku panduan yang dapat digunakan oleh karyawan Satker Deputy III BPOM RI

dalam penggunaan Sistem Aplikasi Satker (SAS) dalam pengelolaan keuangan dengan baik.

2. Media buku panduan ini dapat digunakan agar dapat menghindari kesalahan dalam penggunaan aplikasi yang dapat berakibat terlambatnya pencairan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor sehari-hari.

